

UNTUK CEGAH JAKARTA BANJIR

Heru Budi Hartono Minta Wali Kota Tanam Pohon

JAKARTA (IM) - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta para wali kota untuk menanam pohon. Langkah ini menyusul dari upaya pencegahan terjadinya banjir.

"Pak wali kota, para wali kota, saya ingin meminta kepada pak wali tanam pohon sebanyak-banyaknya. Titiknya di mana, terserah. Sebulan sekali kita, asisten, Sekda, sebentar aja jam delapan sampe jam sembilan," ujarnya saat memberi pengarahannya di Taman Ismail Marzuki, Selasa (18/10).

Dia mengatakan jumlah yang harus ditanam sekitar 600 sampai seribu pohon. Penanaman itu diberi waktu selama satu bulan.

"Kemarin Pak Wali Kota Jakarta Timur di Becakauy dan seterusnya tanam. Setelah sudah banyak. Tapi saya kasih waktu satu bulan, terserah dari wali kota mana saya serahkan ke bapak-bapak," tuturnya.

Kemudian, kata Heru, para wali kota bisa melaporkan jika sudah menanam pohon dengan jumlah yang ditanam. Setelah itu nantinya bakal dilakukan penanaman lagi di titik-titik tertentu dan boleh diusulkan di mana saja tempatnya.

"Nanti kalau bapak lapor

sudah tertanam 600, 700 atau seribu, kita tanam di titik tertentu yang sudah diusulkan oleh Dinas Taman boleh, usulan pak wali kota boleh. Kita datang jam delapan tanam pohon, nanti kita tinjau sekitar di sana ada program saluran atau program dari Dinas Kesehatan, pengentasan stunting," katanya.

Selain pengarahannya tersebut, Heru juga meminta para wali kota tidak mengambil cuti atau pergi keluar kota. Alasannya karena saat ini telah memasuki musim hujan dan diminta agar siaga memantau wilayah masing-masing.

Heru juga memberi pengarahannya pada para lurah, camat, kepala dinas, wali kota dan wakil wali kota. Dia mengingatkan kepada jajarannya untuk saling berkolaborasi dalam menghadapi persoalan Jakarta.

"Saya tadi sampaikan ke teman-teman Asbag, Sekda, ketika di lapangan, harus berkolaborasi ketika nanti Januari, Februari, hujan lebat, tolong kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk merilis, misalnya antara lain dengan Dinas Perhubungan mengimbau misalnya dua hari lagi berdasarkan analisa BMKG hujan lebat," ujarnya. ● yan

DKI Gelar Festival Keroncong 2022

JAKARTA (IM) - Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara menggelar Festival Keroncong di Hotel Ibis Styles, Sunter, Jakarta Utara. Festival itu digelar pada 18-20 Oktober 2022 dan diikuti 14 grup serta diramaikan penampilan dari berbagai sanggar keroncong Jakarta Utara.

Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara, Rofiqoh, mengatakan, Festival Keroncong ini digelar sebagai salah satu cara agar musik keroncong tetap hidup sekaligus dapat menampilkan grup-grup Keroncong yang selama ini berkuprah di Jakarta dari segala kalangan, terutama Jakarta Utara. "Melalui Festival Keroncong yang kali pertama diadakan, maka kami membuka kesempatan bagi grup dari seluruh wilayah DKI Jakarta," ungkap Rofiqoh, Selasa (18/10).

Rofiqoh menjelaskan, keroncong merupakan musik asli dari Indonesia yang telah lahir dan berkembang. Musik keroncong memiliki banyak gaya dalam perkembangannya seperti musik Keroncong Tugu, Keroncong gaya Jakarta, Keroncong gaya Solo, Keroncong gaya Yogyakarta dan sebagainya.

"Di Jakarta banyak tersebar grup keroncong dengan berbagai gaya," ucap Rofiqoh.

Ia menyampaikan, dalam sejarahnya, musik keroncong tidak bisa dilepaskan dari Jakarta Utara. Kampung Tugu dengan orang-orang Mardijekers atau orang Portugis yang telah dimerdekan Belanda diberikan tempat di wilayah di daerah Ommentaden atau luar benteng Batavia yang luas wilayahnya menjadi Semper Barat, Semper Timur, Tugu dan Koja.

"Dalam mengusir kejenihan, maka orang-orang Tugu membuat alat musik keroncong tetap hidup sekaligus dapat menampilkan grup-grup Keroncong yang selama ini berkuprah di Jakarta dari segala kalangan, terutama Jakarta Utara. "Melalui Festival Keroncong yang kali pertama diadakan, maka kami membuka kesempatan bagi grup dari seluruh wilayah DKI Jakarta," ungkap Rofiqoh, Selasa (18/10).

Rofiqoh berharap kegiatan ini dapat membangkitkan kembali popularitas musik keroncong juga memacu generasi milenial bersemangat untuk menjadi penerus dan mengembangkan musik keroncong.

"Diharapkan untuk kedepannya Festival Keroncong ini dapat dilaksanakan secara berjenjang sampai tingkat provinsi," tukas Rofiqoh.

Perlu diketahui, lima grup terbaik dan juga kategori perorangan akan diberikan uang pembinaan, tropi, dan piagam penghargaan dari Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Utara sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta. ● yan

Sudah 23 Tahun Berdiri, Depok Belum Punya BPBD

DEPOK (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajukan pembentukan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) sendiri. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok, Mohammad Idris menindaklanjuti adanya potensi bencana di Depok yang lebih besar.

Idris menyebutkan semestinya Depok memiliki BPBD sendiri. Namun, lanjutnya, keterangan yang didapat dari pemerintah pusat, potensi bencana di Depok dianggap belum terlalu tinggi.

"Ya, seharusnya sudah ada BPBD. Saya sudah mengajukan BPBD untuk di Kota Depok, tapi pemerintah, pemerintah pusat melihatnya apple to apple gitu," papar Idris usai acara di Rumah Maggot, Cimpacun, Tapos, Selasa (18/10).

Ia mencontohkan, Bogor memiliki BPBD sendiri lantaran jumlah penduduk yang tinggi. Ditambah, potensi bencana dianggap lebih besar dari wilayah Depok.

"Bogor itu penduduknya 12-13 juta ya. Dan area potensi bencana itu besar dibanding Depok. Makanya, menurut mere-

ka, Depok ditangani damkar (pemadam kebakaran) dulu," papar Idris.

Idris mendorong Dinas Pemadam Kebakaran Depok untuk aktif juga menangani bencana. Pemerintah Kota akan tetap berupaya menghadirkan BPBD di Depok.

"Longsor di Depok, bagi orang Majalengka itu dikit, kecil, bagi kita besar. Makanya, damkar yang saya genjot mengurangi potensi kebakaran dan juga membantu mereka dalam kondisi longsor. Tapi sudah kita ajukan untuk pembentukan badan," tandasnya.

Berdasarkan situs Pemkot, Kota Depok diresmikan menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok pada 23 tahun lalu, tepatnya 20 April 1999, berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 1999. Peresmian pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dilakukan pada 27 April 1999 bersamaan dengan Pelantikan Pejabat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok saat itu, Drs H Badrul Kamal, yang menjabat Wali Kota Kota Administratif Depok. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANT



POSKO PELAYANAN

PENGADUAN MASYARAKAT DI BALAI KOTA DKI JAKARTA

Petugas melayani warga yang melapor di Posko Pengaduan Masyarakat, Kompleks Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Selasa (18/10). Pemprov DKI Jakarta membuka kembali pelayanan pengaduan masyarakat secara langsung setiap harinya pada pukul 08.00 WIB - 09.00 WIB di Balai Kota Jakarta dan secara daring melalui aplikasi Jaki untuk menyerap secara langsung berbagai permasalahan warga Ibu Kota.

Baru Dua Hari Jabat Gubernur, Heru Langsung Dapat Ancaman PA 212

Novel mengatakan pihaknya akan mengepung gedung Balai Kota Jakarta jika nantinya Heru kembali berulah sebagaimana pada era Ahok memimpin ibu kota. Menurutnya, kebijakan Ahok saat menjadi gubernur banyak bermasalah.

JAKARTA (IM) - Baru dua hari menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono langsung mendapat ancaman dari kelompok PA 212. Mereka mengancam akan mengepung Balai Kota jika Heru coba-coba mengembalikan kebijakan Ahok saat jadi gubernur DKI Jakarta dulu.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan Heru memiliki rekam jejak yang sama dengan Ahok. Tanpa membeberkan detailnya, Novel menyebut

Heru adalah copy paste Ahok yang terlibat kasus-kasusnya korupsi lama di sejumlah proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Heru Budi Hartono punya rekam jejak ikut serta atas kejahatan ketika Ahok menjabat. Di antaranya kasus Sumber Waras, kasus tanah Cengkareng dan lain-lain. Dan juga Heru diduga ikut serta atau sekurang-kurangnya terlibat dalam kasus mark-up harga pengadaan bus Transjakarta ketika era Jokowi," kata

Novel kepada wartawan belum lama ini.

Novel mengatakan pihaknya akan mengepung gedung Balai Kota Jakarta jika nantinya Heru kembali berulah sebagaimana pada era Ahok memimpin ibu kota. Menurutnya, kebijakan Ahok saat menjadi gubernur banyak bermasalah.

"Kalau apa yang kami khawatirkan terjadi lagi maka kami dari Spirit 212 tidak akan segan-segan mengepung Balai Kota karena saya dkk ketika itu sudah jadi korbannya kezaliman Ahok sampai saya beserta 17 orang FPI ketika masuk penjara melawan kezaliman Ahok," ujarnya.

Ia kemudian menyinggung sosok Anies Baswedan yang menurutnya adalah antitesa oligarki. Untuk itu, kata dia, ada upaya sistematis sejumlah pihak untuk menyingkirkan Anies, termasuk dengan

menyamakan jadwal Pilkada Serentak dan Pilpres.

"Pilkada Serentak dibarengi Pilpres serta Pileg jelas adalah agenda busuk untuk menjegal Anies karena dia simbol pelawanan oligarki yang

telah 85 persen membebaskan pajak kepada warga yang tidak mampu agar bisa mempertahankan tanahnya tidak digusur oleh oligarki sehingga Anies sangat membahayakan oligarki," kata Novel. ● yan

Posko Pengaduan Masyarakat Era Ahok Kembali Efektif

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih, Heru Budi Hartono, resmi membuka kembali posko pengaduan masyarakat DKI Jakarta era Ahok di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/10). Menurutnya,

pembukaan posko di Balai Kota merupakan salah satu pilihan yang bisa digunakan oleh warga untuk mengadukan masalah tertentu.

"Mereka ingin secara fisik datang gapapa, datang sambil lihat-lihat Balai Kota. Atau, lewat aplikasi silakan, itu kan pilihan," kata Heru kepada awak media di Balai Kota, Selasa (18/10).

Ditanya alasan pertimbangan pembukaan posko pengaduan lebih jauh, dia tak menjawabnya. Namun demikian, dirinya menyebut, pelayanan itu telah diputuskan untuk kembali efektif sejak dirinya resmi dilantik oleh Presiden Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian, kemarin.

Berdasarkan pantauan, sejak pagi sekira pukul 08.00 WIB, beberapa warga sudah tiba dan hendak membuat pengaduan kepada kantor Penjabat Gubernur yang menggantikan Anies itu. Dari tujuh laporan yang datang, aduan dari warga Jakarta Timur paling banyak di hari pertama, dengan tiga laporan. Sedangkan Jakarta Pusat satu aduan, Jakarta Selatan dua kasus, dan Jakarta Utara 1 kasus.

Menurut Heru, pembukaan posko aduan itu akan dibuka selama beberapa hari dalam sepekan, Senin hingga Kamis. Alasan Jumat ditidakan, kata dia, karena jadwal yang singkat, meskipun, pembukaan pengaduan dilayani hanya 90 menit dari pukul 08.00 WIB hingga 09.30 WIB.

Sementara itu, salah satu warga dari Kelurahan Petogasan, Pulo Raya, Jakarta Selatan, Retno, sengaja datang untuk melapor ke kendala banjir yang kembali kerap melanda rumahnya. Menurut dia, setelah melapor, aduan dianjurkan untuk ditindaklanjuti, walaupun dirinya pesimis dengan janji yang diterima pihak Pemprov DKI.

"Saya sendiri saja yang lapor. Jadi rumah saya sejak 1993 itu banjir, dan memang sering. Tapi dari 2013 sampe 1 Januari 2020 tidak banjir sama sekali. Baru pada 1 Januari 2020 kembali banjir. Kok bisa ya?" tanya Retno masih penasaran.

Menurut dia, banjir yang dialami sejak awal tahun 2020 itu, terus berulang hingga saat ini. Menurut dia, aduan itu sengaja dilakukan pihaknya setelah mendengar ada layanan aduan langsung di Balai Kota DKI.

"Saya pikir ini mumpung ada prioritas banjir, jadi saya gunakan kesempatan ini," jelasnya.

Di lokasi yang sama, perwakilan warga lainnya yang

beralamat di Jakarta Timur tepatnya kawasan Bumbu Apus, Martina Gunawan, mendampingi warga lainnya untuk mengajukan permohonan pembebasan lahan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Menurut dia, aduan serupa sebenarnya sudah dilakukan lebih dari 10 kali sejak kepemimpinan Ahok. Kendati demikian, alih-alih ada tindak lanjut, dirinya merasa Pemprov DKI tidak serius, mengingat adanya permintaan uang dan perubahan nama Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang kian mempersulit.

"Kami merasa dilayani tidak profesional. Terus terang kami sebagai warga biasa, sangat mengalami kebingungan," ucap Martina.

Dia menyebut, salah satu oknum yang meminta dana adalah kepala UPT yang lama beserta timnya. Sedangkan, nilai yang diminta pihak tersebut, dikatakan Martina mencapai Rp 150 juta hingga lebih dari itu.

"Saya tidak mau bayar sepeser pun," tegas dia.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya akan mengadakan kembali posko pengaduan masyarakat di Balai Kota DKI. Menurut dia, hal itu akan dimulai dengan memberikan pengarahannya kepada seluruh pejabat di Pemprov DKI Jakarta.

"Insya Allah begitu, besok saya melakukan pengarahannya ke seluruh pejabat DKI, nanti ada poin-poinnya," kata Heru kepada awak media di Balai Kota, Senin (17/10).

Menurut Heru, pelayanan masyarakat dengan posko di Balai Kota juga bisa diwakili oleh Sekda DKI Marullah Matali dan tiga Aspem lainnya. Meski demikian, penerimaan itu akan diatur waktunya sesingkat mungkin.

"Nanti diatur sama assistennya siapa yang piket dari jam 8-9 saja," tuturnya. ● yan

Langgar Netralitas, Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi Disanksi Moral

BEKASI (IM) - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Juhandi dikenakan sanksi moral akibat pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah menghadiri rapat pleno sebuah partai politik pada Senin 27 September 2022 lalu.

Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan sanksi moral tersebut dijatuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pemerintah daerah melalui Inspektorat Kabupaten Bekasi bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Itu sudah menjadi rekomendasi KASN yang harus kami lakukan, bentuk hukumannya hukuman moral," kata Dani, Selasa (18/10).

Dani menjelaskan sanksi moral yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan adalah diwajibkan menyampaikan permohonan maaf serta klarifikasi

mengenai pelanggaran yang dilakukan berdasarkan bukti rekaman video saat menghadiri kegiatan partai politik.

Selanjutnya video itu nanti akan dikirimkan kepada KASN sebagai laporan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan konsekuensi atas pelanggaran tersebut.

Dani berharap kejadian tersebut bisa dijadikan pelajaran bagi ASN lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa. Terlebih lagi, menjaga netralitas ASN merupakan satu dari sekian banyak tugas yang harus dibenahi di masa kepemimpinannya.

"Memang sejak awal saya bertugas, salah satu yang harus saya benahi adalah menjaga netralitas ASN. Dengan adanya kasus pelanggaran etika terkait dengan netralitas saya harap dijadikan momentum kita untuk mengingatkan kembali," tegasnya.

Pengumuman pemberian



PEMBANGUNAN JEMBATAN PENYEBRANGAN ORANG TERINTEGRASI Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan penyeberangan orang (skywalk) yang menghubungkan Stasiun Kebayoran Lama dan Halte Transjakarta di Kebayoran, Jakarta, Selasa (18/10). Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga DKI Jakarta membangun jembatan penyeberangan orang Kebayoran Lama yang memiliki panjang 450 meter dengan desain dan cahaya artistik serta dilengkapi dengan fasilitas lift yang mengintegrasikan stasiun kereta rel listrik (KRL) Kebayoran dengan Halte Transjakarta Koridor 8 dan Koridor 13.

FOTO/ANT

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN

Direksi PT. Agra Prima Plantation ("Perseroan") dengan ini mengumumkan rencana penjualan dan pengalihan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan melalui pengambilalihan saham secara langsung dari para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") yang mana rencana tersebut akan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan dan perubahan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan ("Rencana Pengambilalihan"). Keberatan atas Rencana Pengambilalihan dapat disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan pada alamat di bawah ini, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman ini yaitu tanggal 1 November 2022.

Demikian pengumuman ini disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) UUPT dan agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Selasa, 19 Oktober 2022

Untuk dan atas nama Direksi

PT. Agra Prima Plantation

Jl. Alpida KS Tuban Raya No. 66C,

Silpi, Jakarta Barat, DKI Jakarta